

Perubahan perlakuan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak terhadap prinsip non-interferensi ASEAN dalam isu Rohingya = The alterations deal of Malaysian Prime Minister Najib Razak against the ASEAN non-interference principle on rohingyas issue / Gabriela Ekklesia

Gabriela Ekklesia, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20467267&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Tindak kekerasan yang terjadi terhadap etnis Rohingya di Myanmar telah terjadi sejak tahun 1970-an dan masih terjadi di tahun 2017. Perdana Menteri Malaysia Najib Razak menyatakan bahwa tindak kekerasan terhadap etnis Rohingya harus dihentikan. Malaysia juga mengajak anggota ASEAN untuk mengabaikan prinsip non-interferensi terhadap isu Rohingya ini. Hal ini menarik untuk ditelaah mengingat Malaysia merupakan salah satu negara pendiri ASEAN dan pertanyaan kemudian muncul apakah tanggapan Malaysia terhadap isu Rohingya menampakkan pergeseran dari norma yang disepakati. Dengan demikian, pertanyaan penelitian pada tesis ini adalah: Mengapa Perdana Menteri Malaysia Najib Razak mengabaikan prinsip non-interferensi ASEAN dalam isu Rohingya?

Untuk menjawab pertanyaan penelitian, tesis ini menggunakan teori kebijakan luar negeri Valerie M. Hudson sebagai dasar dalam menjelaskan penyebab tindakan dan perkataan seorang pemimpin (agen-oriented) sebagai decision maker yang dapat mempengaruhi kebijakan luar negerinya. Untuk menjelaskan faktor penyebab tindakan dan perkataan agen oriented tersebut, maka tesis ini menggunakan operasionalisasi teori dari Evi Fitriani, yang dijelaskan dalam tiga faktor; yaitu: motivasi, emosi dan representasi masalah.

Hasil analisis, menunjukkan bahwa Najib Razak memiliki kepentingan pribadi melalui sikapnya sebagai Perdana Menteri Malaysia terhadap isu Rohingya. Najib Razak berusaha menjaga eksistensi posisinya sebagai Perdana Menteri yang sempat tergoyahkan karena tuduhan keterlibatan dirinya dalam kasus 1MDB. Najib Razak mengkhawatirkan masalah keamanan dengan adanya kasus ini, karena dengan bertambahnya jumlah pengungsi Rohingya, dapat mengganggu stabilitas regional keamanan di Asia Tenggara. Selain itu, Najib Razak juga mengusung tema kemanusiaan dan HAM dalam isu Rohingya ini.

Dengan demikian, Perdana Menteri Najib Razak menunjukkan sikap yang telah mengabaikan prinsip non-interferensi ASEAN. Hal ini dapat menimbulkan keretakan dalam tubuh ASEAN dan dapat mengganggu stabilitasnya kawasan, karena nilai yang diabaikan yaitu prinsip non-interferensi adalah nilai yang

diharapkan dapat menjaga stabilitas institusi ASEAN.

<hr>

ABSTRACT

Violent acts against Rohingyas in Myanmar have occurred since the 1970s and still occurred in 2017. Malaysian Prime Minister Najib Razak stated that violence against Rohingyas must be stopped. Malaysia also invites ASEAN members to ignore the ASEAN non-interference principle on Rohingya issue. This is interesting to be reviewed as Malaysia is one of the founding countries of ASEAN not the less the question has arisen whether Malaysia's response to the Rohingya issue reveals a shift from the agreement.

Thus, this thesis aim at reviewing why Malaysian Prime Minister Najib Razak neglects the ASEAN non-interference principle in the Rohingyas issue. To do so, this thesis applies Valerie M. Hudson's foreign policy theory as the basis for explaining the cause of action and the words of a leader (agent-oriented) as a decision maker that can influence its foreign policy. In order to explain the cause and action factor of the oriented agent, this thesis using the theory operationalization from Evi Fitriani, described in three factors; namely: motivation, emotion and problem representation.

The results of the thesis analysis indicate that Najib has a personal interest through his attitude as Prime Minister of Malaysia against Rohingya case. Najib tried to maintain the existence of his position as Prime Minister who had been shaken because of his alleged involvement in the case of 1MDB. Najib is concerned about security issues in this case, as the growing number of Rohingya refugees can disrupt regional security stability in Southeast Asia. In addition, Najib also carries the theme of humanity and human rights in Rohingya issue.

Thus, Prime Minister Najib Razak shows an attitude of being an ignorance to the ASEAN principle of non- interference. This can create problem within ASEAN institution and can disrupt their stability, because ASEAN non-interference principles has been neglected which it was the value to maintain the stability of ASEAN the negligible value of ASEAN non-interference principles is the value that expected to maintain the stability southeast regional.